

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia hubungan internasional, isu-isu yang ada saat ini sudah tidak lagi mencakup isu-isu tradisional seperti perang. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran aktor hubungan internasional akibat pengaruh dari kegiatan kenegaraan. Kehadiran organisasi nirlaba yang independen atau biasa disebut dengan *Non Governmental Organization (NGO)* dalam dunia internasional semakin mempengaruhi pergerakan isu yang ada. Kegiatan yang dilakukan NGO ini dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, sosial, advokasi hingga hak asasi manusia. Tidak jarang kegiatan yang dilakukan NGO juga dapat bertujuan untuk mempromosikan perubahan sosial hingga perubahan politik. Hadirnya fenomena globalisasi pun semakin membantu pergerakan NGO ke negara-negara di dunia.

World Wildlife Fund (WWF) merupakan organisasi konservasi terkemuka yang telah bekerja selama 60 tahun di hampir 100 negara dunia dengan enam tujuan ambisius yaitu: iklim, makanan, hutan, margasatwa, air tawar dan lautan. Selain itu, WWF juga bekerja untuk membantu masyarakat lokal melestarikan sumber daya alam yang menjadi andalan; mengubah pasar dan kebijakan menuju keberlanjutan; dan melindungi serta memulihkan spesies dan habitatnya. WWF berupaya untuk memastikan nilai-nilai alam ini tercermin dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam skala lokal maupun internasional. Untuk mencapai tujuannya ini, WWF membangun kerjasama dengan komunitas, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia (*World Wildlife Fund (WWF)*, t.thn.).

Minyak kelapa sawit ini banyak digunakan untuk berbagai macam produk, seperti margarin hingga lipstik,

biskuit hingga lilin, cokelat hingga deterjen, dan berbagai rangkaian produk rumah tangga lain-lainnya karena minyak kelapa sawit dapat menyatu dengan baik dengan minyak lainnya yang kemudian memudahkan proses pembentukan produk meskipun dengan konsistensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Di luar industri makanan dan produk rumah tangga, minyak kelapa sawit ini tidak jarang digunakan bahkan sebagai bahan bakar nabati hingga sebagai makanan ternak. Berbagai macam fungsi yang dapat dihasilkan dan digunakan oleh minyak kelapa sawit ini membuat minyak kelapa sawit ini sendiri mendapat gelar sebagai minyak nabati yang paling banyak dan diperdagangkan di dunia (World Wildlife Fund (WWF), 2020).

Minyak sawit sendiri tidak hanya sangat berguna, tetapi juga sangat produktif dengan hasil produksi yang jauh lebih besar daripada minyak nabati lainnya namun sebaliknya, dari wilayah yang jauh lebih kecil. Industri minyak kelapa sawit ini telah membantu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan tentunya telah berkontribusi banyak terhadap kesejahteraan penduduk lokal juga ekonomi nasional. Namun, dalam proses produksinya kelapa sawit seringkali diolah dengan tidak bertanggung jawab yang kemudian berdampak pada hancur dan hilangnya hutan hujan secara meluas serta tidak jarang juga bahkan mengorbankan kesejahteraan komunitas lokal (World Wildlife Fund (WWF) , 2020).

Bagi sosial dan lingkungan, meningkatnya permintaan minyak sawit telah banyak menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi karbon yang semakin dikaitkan dengan apa yang telah dunia alami saat ini (World Wildlife Fund (WWF) , 2020). Kelapa sawit yang banyak tumbuh di dataran rendah, panas, basah, daerah tropis, yang mana wilayah itu adalah sama dengan kisaran lebih dari dua pertiga habitat

keanekaragaman hayati dunia. Penebangan yang dilakukan guna membuka lahan bagi tumbuhnya kelapa sawit kian hari kian menyebabkan kerusakan yang meluas pada hutan hujan. Tidak hanya itu, hilangnya habitat spesies yang terancam punah maupun spesies yang hampir punah seperti orangutan, gajah, dan harimau juga menjadi dampak dari pembukaan lahan tersebut. Konversi yang dilakukan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif pada habitat yang berdekatan melalui fragmentasi, serta menyebabkan polusi yang juga dapat mengakibatkan penurunan dramatis pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (World Wildlife Fund (WWF), 2020).

Konversi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit pada prosesnya telah melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar yang mana ini semakin mempercepat terjadinya perubahan iklim. Praktik industri yang mengeringkan dan mengubah hutan menjadi lahan gambut ini sangat merusak upaya mitigasi iklim dikarenakan penyerap karbon yang seharusnya menyimpan karbon jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ekosistem lain di dunia.

United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa memperingatkan Indonesia bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia akibat perluasan lahan kelapa sawit membuat hampir 10 juta anak beresiko terkena polusi udara. Bayi yang beresiko lahir prematur dan dengan berat badan lahir rendah, jutaan anak diperkirakan tidak masuk sekolah, yang mana hal ini mengakibatkan kerusakan fisik dan kognitif seumur hidup (World Wildlife Fund (WWF), 2020). Tidak jarang, perluasan lahan kelapa sawit juga mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal dan adat dalam bentuk perampasan tanah, pemindahan paksa, pelecehan, kriminalisasi dan hilangnya tanah yang mana tanah itu seharusnya digunakan untuk makanan, obat-obatan, dan penyediaan layanan lokal lainnya.

Konflik yang timbul dari kondisi kerja pekerja perkebunan dan diskriminasi terhadap petani juga telah menjadi dampak dari perluasan lahan kelapa sawit ini.

Proyeksi peningkatan permintaan global untuk minyak nabati berarti bahwa penggunaan lahan akan semakin mengkhawatirkan sehingga memerlukan adanya penilaian yang cermat terhadap ketergantungan tersebut. Namun, beralih dari minyak nabati bukanlah solusi jangka panjang yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Mengganti minyak kelapa sawit dengan jenis minyak nabati lain berarti ini membutuhkan lahan yang jauh lebih luas yang mana secara tidak sengaja hal ini menambah efek deforestasi dan konversi habitat ke wilayah lain dunia. Oleh karena itu, amat penting bagi WWF sendiri sebagai organisasi nirlaba sekaligus organisasi konservatif terkemuka untuk mengajak para perusahaan yang menggunakan minyak sawit untuk lebih bertanggungjawab dalam jangka panjang dengan mengalihkan produktifitas mereka menjadi produktifitas yang keberlanjutan daripada mencoba melakukan aksi boikot satu sama lain (World Wildlife Fund (WWF) , 2020).

Melihat fenomena terkait minyak sawit yang berdampak pada lingkungan juga pada masyarakat lokal dan adat, WWF menggaungkan program minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui program *WWF Palm Oil Buyers Score Card*. *WWF Palm Oil Buyers Score Card* ini pertama kali dibuat satu dekade yang lalu pada saat WWF melihat banyak merk-merk perusahaan dunia terus menerus meraup keuntungan dari industri kelapa sawit di mana pada saat yang bersamaan pula pembakaran hutan dan lahan gambut untuk ekspansi minyak sawit terus dilakukan (World Wildlife Fund (WWF), t.thn.). WWF percaya bahwa salah satu cara terpenting untuk menyelamatkan lingkungan, masyarakat adat dan lokal, serta untuk mewujudkan minyak sawit yang berkelanjutan

adalah dengan menarik perusahaan baik yang menggunakan maupun yang memproduksi minyak sawit untuk bergabung dengan *Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* dan mengikuti standar dan pedoman RSPO (World Wildlife Fund (WWF) , 2020).

WWF ikut mendirikan RSPO pada tahun 2004 dengan tujuan membawa seluruh industri minyak sawit dari petani hingga pedagang, penyuling, produsen, dan pengecer bersama dengan NGO dan sektor keuangan untuk berkolaborasi membuat minyak sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi RSPO adalah cara termudah bagi perusahaan di industri minyak sawit global dengan berbagai macam ukuran perusahaan untuk dapat memproduksi minyak sawit berkelanjutan sekaligus bersertifikasi RSPO. Namun, sertifikasi saja tidak cukup untuk mewujudkan produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Oleh karenanya, WWF mengeluarkan program *WWF Palm Oil Buyers Scorecard* yang digunakan untuk memantau proses pembelian juga produksi perusahaan terhadap minyak sawit. Dalam skemanya, perusahaan sedianya dapat menanggung 100% pembelian minyak sawit mereka dengan *RSPO Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)* dengan berkomitmen dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka bebas dari deforestasi dan konversi ekosistem alami, bebas dari degradasi lahan gambut, dan bebas dari eksploitasi (World Wildlife Fund (WWF) , 2020).

Perusahaan harus mengambil tindakan untuk mendukung industri yang berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan yang berorientasi pada tindakan untuk menginvestasikan proyek di lapangan seperti mendukung petani kecil untuk mengadopsi praktik yang bertanggung jawab dan menerapkan konservasi dan reboisasi di area produksi yang terkena dampak (World Wildlife Fund (WWF) , 2020).

Selain itu, melalui program *WWF Palm Oil Buyers Scorecard*, perusahaan diharuskan untuk menggunakan *Accountability Framework (AFi)* sebagai referensi dalam melaksanakan praktik terbaik yang diikuti dengan tindakan mendukung kebijakan pemerintah yang memungkinkan terjadinya produksi berkelanjutan dan impor berkelanjutan (World Wildlife Fund (WWF), 2020).

Scorecard menilai sebanyak 173 perusahaan yang tersebar di negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Inggris, Irlandia, Portugal, Denmark, Swedia, Polandia, Finlandia, Italia, Australia dan beberapa negara Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Penilaian ini berdasarkan pada komitmen yang telah dibuat dan disepakati serta tindakan yang telah dilakukan untuk: pertama, memastikan rantai pasokan perusahaan tersebut berkelanjutan dan bebas dari konversi ekosistem alami termasuk hutan dan; kedua, perusahaan mendukung industri minyak sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di luar rantai pasokan mereka sendiri (World Wildlife Fund (WWF), 2020).

Penilaian terhadap perusahaan – perusahaan ini dinilai dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh RSPO yang kemudian dikirimkan oleh perusahaan yang menjadi anggota RSPO melalui proses *Annual Communication of Progress (ACOP)*. ACOP ini mencakup data pembelian CSPO yang dilakukan pada tahun sebelumnya, termasuk juga dengan kuesioner yang telah diisi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh RSPO ACOP. Dalam proses penilaian ini, perusahaan diminta untuk memberikan bukti pendukung informasi yang relevan, transparan, jujur, dan akurat dalam pelaporan mereka (World Wildlife Fund (WWF), 2020).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana upaya WWF mengembangkan program WWF Palm Oil Buyers Scorecard guna mendorong produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut *Margaret E. Keck* dan *Kathryn Sikkink*, *Transnational Advocacy Network (TAN)* atau jaringan advokasi transnasional merupakan suatu jaringan advokasi di mana di dalamnya mencakup actor-aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu isu yang kemudian terikat oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan adanya pertukaran informasi maupun jasa. *Keck* dan *Sikkink* menekankan bahwa inti dari hubungan tersebut ialah pertukaran informasi. Kemampuan actor internasional non-tradisional dalam memobilisasi informasi secara strategis yang kemudian menciptakan isu dan kategori isu baru dengan tujuan untuk membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh atas organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat, menjadi hal yang baru dalam hubungan dan politik internasional. Dalam karakteristiknya TAN memiliki ciri khas tersendiri di mana TAN bekerja secara terorganisir dalam upayanya mempromosikan penyebab, ide-ide, dan norma-norma yang bahkan tidak jarang melibatkan individu untuk ikut serta dalam mengadvokasi kebijakan perubahan (*Keck & Sikkink, 1999*).

Actor TAN tidak hanya terdiri dari *non-government organization* saja, melainkan di dalamnya terdapat beberapa actor lain seperti yayasan, media, gereja, lembaga penelitian, hingga bagian dari organisasi pemerintah regional dan internasional, juga bagian dari cabang pemerintah eksekutif dan/atau parlementer. Terlepas dari perdebatan atas perbedaan ranah dari setiap aktornya, TAN justru berjalan dengan baik

karena menekankan hubungan yang terbuka dengan pola komunikasi dan pertukaran sukarela, timbal balik, serta horizontal, sehingga tidak memunculkan dominasi antar actor. Jenis-jenis kelompok yang muncul dan menjadi ciri dari TAN justru bukan lah hal baru. Beberapa kelompok telah ada sejak kampanye abad ke-19 dalam hal upaya penghapusan perbudakan. Dalam tiga decade terakhir, jumlah, ukuran, profesionalisme, kepadatan hingga kompleksitas hubungan internasional kelompok-kelompok ini telah tumbuh dengan luar biasa. Sehingga, menjadi hal yang lumrah untuk saat ini kita berbicara tentang jaringan advokasi transnasional.

Kemunculan TAN juga hal baru, TAN hadir karena beberapa alasan seperti salah satunya ialah terhambat atau terputusnya saluran antara hubungan pemerintah dengan organisasi local yang kemudian hal ini membuat proses penyelesaian konflik menjadi tidak efektif. Dari hal ini, inisiasi atas munculnya jejaring advokasi transnasional yang seolah-olah tanpa batas, dan terjalin dari berbagai negara dan kalangan dipercaya oleh beberapa pihak dapat mengangkat suatu isu hingga mempermudah proses advokasi. Melalui konferensi internasional dan bentuk lain dari kontak internasional menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan advokasi. Sehingga dalam implementasinya, jejaring advokasi transnasional ini kerap dimanfaatkan oleh para pemilik kepentingan sebagai alat untuk mengangkat suatu isu agar didengar oleh pemerintah. Hadirnya para aktor lain dalam jejaring ini juga berperan sebagai kelompok penekan atau *pressure group*. Interaksi para aktor dalam mengangkat suatu isu ini kemudian melahirkan pola interkasi baru, yaitu *boomerang pattern*.

Jejaring transnasional menggunakan kekuatan informasi, ide-ide, dan strategi untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Di mana dalam hal ini, konsep TAN yang digaungkan oleh Keck & Sikkink ini mengembangkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk

mempromosikan, juga untuk mencapai suatu kepentingan atau tujuan. Strategi-strategi tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

1. *Information politics*, merupakan kemampuan untuk mengumpulkan, mengembangkan, dan memindahkan informasi politik dengan cepat dan terpercaya ke masyarakat maupun actor lain untuk kemudian informasi tersebut dapat memberikan hasil yang berpengaruh. Pertukaran informasi ini juga dapat bersifat informal seperti melalui faks, pamphlet, dan bulletin. Sehingga peran penting actor non-negara dalam strategi ini ialah sebagai sumber informasi alternatif yang dapat dipahami juga berguna bagi NGO juga masyarakat.
2. *Symbolic politics*, merupakan kemampuan untuk menggunakan symbol, Tindakan atau cerita yang masuk akal dari satu peristiwa atau situasi untuk mewakili isu yang akan diangkat dan disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya *symbolic politics* ini, suatu isu menjadi lebih mudah untuk dipahami, sehingga proses advokasipun menjadi lebih mudah.
3. *Leverage politics*, merupakan kemampuan untuk menekan actor yang memiliki pengaruh atau *power* yang lebih besar untuk memberikan pengaruh atau *powernya* kepada actor yang memiliki pengaruh lebih kecil. Strategi ini biasanya digunakan untuk memperkuat juga memperluas jaringan dan ditujukan untuk memperkuat gerakan disaat actor tertentu tidak mampu memberikan pengaruh sebagaimana mestinya.
4. *Accountability politics*, merupakan strategi terakhir yang berkaitan dengan upaya para aktor

jejaring advokasi transnasional untuk mengawasi komitmen pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang telah didukung, dibuat, dan disepakati agar dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Para actor jejaring advokasi transnasional kerap kali memberikan usaha lebih pada strategi ini karena kerap kali komitmen ini diabaikan dan dianggap sebagai perubahan yang tidak penting.

Untuk mengukur sejauh apa pengaruh yang dihasilkan oleh jaringan advokasi atas upayanya mempengaruhi atau mencapai tujuan mereka, Keck & Sikkink menggunakan beberapa tingkatan atau tahapan yang berbeda-beda, yaitu: pertama, pembuatan isu dan penetapan agenda; kedua, pengaruh dan posisi diskursif negara dan organisasi regional serta internasional; ketiga, pengaruh pada prosedur institusi; dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap perubahan kebijakan yang dituju.

Konsep *Transnational Advocacy Network* yang digagas oleh Keck & Sikkink dapat menjelaskan bagaimana suatu actor dapat membangun jaringan advokasi dengan actor lainnya melalui kekuatan informasi, ide-ide, serta strategi yang digunakan untuk merespon, menangani, dan mengubah kebijakan mengenai suatu isu. Maka dari itu, konsep TAN sangat cocok digunakan untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh WWF untuk menciptakan produktifitas kelapa sawit yang berkelanjutan dan pro-lingkungan serta pro terhadap masyarakat lokal dan adat. Melalui konsep TAN juga kita dapat melihat upaya WWF dalam membangun jaringan advokasi bersama actor lain, seperti perusahaan multinasional, para pelaku bisnis dengan komoditas utama kelapa sawit, dan negara, yang mana para actor tersebut merupakan pemain kunci dalam industry kelapa sawit ini. Hingga bagaimana WWF membangun jaringan advokasi dengan NGO dan

masyarakat guna mencapai proses produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

D. ARGUMEN RISET

Dengan menggunakan konsep TAN yang digagas oleh Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink, WWF menggunakan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, di mana dalam strateginya WWF berfokus pada kegiatan wacana social dan komunikasi antar actor-aktor internasional berupa kegiatan kampanye, promosi, dan pameran yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, NGO, maupun masyarakat terhadap proses produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang ramah terhadap masyarakat adat juga lingkungan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, berita, prosiding, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau *library research* dengan memanfaatkan data maupun informasi yang dapat diperoleh dari website, buku, jurnal, dan sebagainya yang tentunya dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan topik penelitian.

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengimplementasikan ilmu yang didapat oleh penulis selama masa perkuliahan melalui ulasan dan analisis

dari studi kasus program konservasi WWF, *WWF Palm Oil Buyers Scorecard* di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui peran dan pengaruh yang diberikan oleh WWF terhadap pemerintah maupun perusahaan multinasional dengan komoditi utama minyak kelapa sawit dalam upayanya mendorong minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui program *WWF Palm Oil Buyers Scorecard*.
- c. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh WWF dalam mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah maupun perusahaan multinasional.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini menggunakan sistem penulisan secara deskriptif di mana pada pembahasannya akan memuat sub-sub pokok yang menguraikan permasalahan untuk menjawab pokok permasalahan di atas.

BAB I, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Argumen Riset, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II akan berisikan tentang manfaat minyak kelapa sawit, dampak positif, dan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi masyarakat adat yang timbul akibat adanya perkebunan minyak kelapa sawit. Bab ini juga akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan pertimbangan urgensifitas oleh WWF hingga terbentuknya program *WWF Palm Oil Buyers Scorecard*.

BAB III akan mendeskripsikan tentang upaya *share of idea* yang dilakukan oleh WWF terhadap perusahaan dengan komoditi utama minyak kelapa sawit sesuai dengan strategi dalam Teori Konstruktivisme oleh Alexander Wendt. Bab ini juga akan menjelaskan tentang hasil dari *share of idea* yang dilakukan oleh WWF kepada aktor internasional lainnya guna mendorong minyak kelapa sawit berkelanjutan.

BAB IV merupakan penutup atau bab akhir yang dibuat untuk menutup topik ini. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan isi dari bab-bab sebelumnya yang kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan dan juga saran.